

Gender dan kualitas peradilan

JIN  
.....  
ASEAN



**GENDER DAN  
KUALITAS  
PERADILAN**

JUDICIAL INTEGRITY NETWORK ASEAN

UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkemuka yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan jaringan ahli dan mitra kami yang luas di 170 negara, kami membantu berbagai negara untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini.

Pelajari lebih lanjut di [undp.org](https://undp.org) atau ikuti di [@UNDP](https://twitter.com/UNDP).

Temuan, interpretasi, dan pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNDP, atau Negara Anggota PBB.

Hak Cipta © UNDP 2021

Seluruh hak dilindungi undang-undang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs [Judicial Integrity Network in ASEAN](#)

# Ucapan Terima Kasih

Laporan ini ditugaskan pada tahun 2021 oleh UNDP Bangkok Regional Hub dalam kerangka kerja Proyek Regional tentang "Kualitas Peradilan untuk Memastikan Keadilan Bagi Semua: Jaringan Integritas Peradilan di ASEAN".

Penulis utama laporan ini adalah Sarah McCoubrey (CALIBRATE Solutions), Pakar Integritas Peradilan.

Pengembangan produk pengetahuan ini dikoordinasikan oleh Liviana Zorzi, Spesialis Proyek UNDP untuk Transparansi & Akuntabilitas. Tata letak dirancang oleh Pundaree Boonkerd.

Laporan ini mendapat masukan dari: Nicholas Booth, Ketua Tim Tata Kelola UNDP dan para anggota Kelompok Penasihat Judicial Integrity Network ASEAN:

- Hakim Shiranee Tilakawardane
- Lawrence Glanfield AM
- Dr Nihal Jayawickrama
- Yang Mulia Michael Kirby AC CMG
- Jennifer Marie
- Yang Mulia Murray Kellam AO QC

## MITRA PENDONOR

Penelitian ini dimungkinkan berkat kontribusi dari Pemerintah Amerika Serikat, Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional (INL).



# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih .....	3
Daftar Isi.....	4
Gender dan Kualitas Peradilan .....	5
Gender di Wilayah ASEAN .....	8
Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum .....	12
Gender dan Akses terhadap Keadilan .....	14
Stereotipe dan Diskriminasi Gender di Ruang Sidang Anda .....	17
Gender Sebagai Konsep yang Inklusif.....	22
Mencegah Diskriminasi Gender dalam Putusan Hukum.....	24
Representasi Gender di Lembaga Peradilan.....	27
Pemerasan Berbasis Seksual .....	30
Pelecehan Seksual dan Tindakan Pelanggaran Seksual.....	34
Lampiran .....	37

# Gender dan Kualitas Peradilan

Isu-isu yang berkaitan dengan gender dapat muncul di pengadilan mana pun, di tingkat pengadilan mana pun, oleh siapa pun yang terlibat di pengadilan dan pada tahap mana pun dalam karir hakim, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Isu-isu gender sering kali dianggap sebagai isu perempuan atau hanya relevan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga atau ketika perempuan menjadi pihak yang berperkara. Faktanya, asumsi gender mempengaruhi perempuan dan laki-laki, serta keluarga mereka. Orang-orang transgender, interseks dan non-biner rentan mengalami diskriminasi gender. Staf pengadilan, petugas polisi, saksi ahli dan pengacara mungkin membawa stereotipe gender dalam perilaku mereka atau cara mereka menyajikan bukti.

Identitas dan pengalaman yang berbeda dari setiap orang melapisi atau berinteraksi dengan cara-cara yang memperparah ketidaksetaraan yang mereka hadapi. Stereotipe gender adalah bagian dari diskriminasi yang dialami oleh orang-orang yang rentan, termasuk LGBTI+, penyandang disabilitas, pengungsi, dan migran. Menyadari persinggungan antara gender dengan ras, etnis, orientasi seksual, usia atau disabilitas merupakan bagian dari konteks faktual kasus-kasus hukum. Dampak diskriminasi gender dapat bervariasi, tergantung pada situasi masing-masing orang. Pemahaman tentang gender dan dampak dari asumsi gender juga terus berkembang. Ketika anggota masyarakat bergeser ke arah pemahaman yang lebih adil tentang gender, para hakim

sering kali berada di garis depan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang dilindungi.

*The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menetapkan enam nilai yang menjadi dasar kualitas peradilan. Nilai-nilai ini, jika digabungkan, merupakan fondasi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik dalam pengambilan keputusan peradilan dan melindungi peran penting hakim dalam mempromosikan supremasi hukum dan akses terhadap keadilan, baik dalam keputusan mereka maupun dalam pengelolaan ruang sidang.

Nilai-nilai yang ditetapkan dalam *The Bangalore Principles* yaitu **independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan, kesetaraan**, serta **kecakapan dan keseksamaan**, semuanya memiliki implikasi gender. Ketika para hakim mewujudkan nilai-nilai ini, baik secara individu maupun sebagai pengadilan, perhatian terhadap diskriminasi gender dan ancaman berbasis gender sangat penting.<sup>1</sup>

**Independensi, ketidakberpihakan, dan integritas**, semuanya mengharuskan hakim untuk bertindak tanpa bias atau tanpa pengaruh stereotipe atau keyakinan yang diskriminatif. Keputusan hakim harus bebas dari prasangka dan harus terlihat bebas dari pengaruh apa pun yang didasarkan pada alasan yang tidak relevan, termasuk prasangka yang berkaitan dengan jenis kelamin, gender, orientasi seksual, atau identitas gender. Hakim harus terlihat menolak konsep bias yang

---

<sup>1</sup> [Prinsip-Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore](#) (2002)

diajukan oleh saksi atau pengacara dan membuat keputusan secara transparan, hanya berdasarkan bukti, bukan keyakinan dan asumsi mereka sendiri atau orang lain.

**Kepatutan** mengharuskan hakim untuk berperilaku dengan cara yang tidak tercela dan menjunjung tinggi kepercayaan publik dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perilaku diskriminatif berada jauh di bawah harapan ini. Partisipasi dalam atau mempromosikan wacana diskriminatif dapat menimbulkan kekhawatiran tentang bias dan prasangka terhadap saksi atau masalah hukum.

**Kesetaraan** mengharuskan hakim untuk melindungi semua pihak yang berperkara dan saksi dari diskriminasi, baik dalam mengakses sistem peradilan, memajukan hak-hak mereka sendiri, hadir di pengadilan, memahami hukum, atau menerima ganti rugi. Hakim tidak hanya harus menghindari stereotipe dalam perilaku dan pengambilan keputusan mereka sendiri, tetapi juga harus menentang asumsi dan perilaku diskriminatif dari staf pengadilan, pengacara, dan saksi, serta mengelola ruang sidang agar menjadi tempat di mana orang benar-benar mendapatkan perlakuan yang setara.

**Kecakapan dan keseksamaan** mengharuskan hakim untuk mendidik diri mereka sendiri tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang dampak hukum terhadap perempuan dan orang-orang rentan yang mengandalkan pengadilan untuk melindungi hak-hak mereka. Pendidikan reguler tentang realitas bagi perempuan dan kelompok LGBTI+ membantu hakim untuk mengidentifikasi isu-isu kesetaraan di ruang sidang.

Pembelajaran yang berkelanjutan tentang aspek-aspek gender dalam setiap bidang hukum atau proses memastikan para hakim sadar dan siap untuk mengatasi ketidakadilan ini. Memahami dampak gender melibatkan pemeriksaan bukti dan mendengarkan orang-orang yang pernah mengalami diskriminasi.

Untuk sepenuhnya memenuhi harapan perilaku peradilan ini, para hakim harus terus mendidik diri mereka sendiri, memastikan bahwa ada perlindungan prosedural yang memadai dan memeriksa perilaku mereka sendiri tentang isu-isu yang berkaitan dengan gender. Nancy Hendry, menulis atas nama Global Judicial Integrity Network dari UNODC, menyatakan bahwa "Meskipun beberapa perilaku yang berkaitan dengan gender dapat dilihat sebagai perilaku yang lebih ofensif atau mengerikan daripada perilaku lainnya, tidak ada satupun dari perilaku tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika peradilan."<sup>2</sup> Meskipun intervensi institusional diperlukan dalam beberapa kasus, tindakan hakim secara individu untuk mengubah budaya juga sangat penting.

## PENGAMBILAN TINDAKAN

Judicial Integrity Network ASEAN (JIN ASEAN), sebuah jaringan hakim yang saling mendukung di seluruh wilayah ASEAN, telah mengembangkan Ringkasan Isu ini untuk mendukung hakim dan lembaga peradilan dalam mengambil tindakan atas rekomendasi yang dibahas dalam acara Implementasi Deklarasi Doha oleh UNODC.<sup>3</sup> Ringkasan Isu ini didasarkan pada penelitian sektoral, survei dan diskusi kelompok kecil dengan para hakim di wilayah ASEAN.

---

<sup>2</sup> Hendry, UNODC Halaman 5.  
[https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge\\_products/Gender\\_Paper\\_FINAL\\_DOHA.pdf](https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_products/Gender_Paper_FINAL_DOHA.pdf)

<sup>3</sup> Dilaksanakan 24-26 Februari 2020, "High-Level Meeting of the Global Judicial Integrity Network", Doha, Qatar

Merefleksikan pentingnya isu-isu ini dan kekhawatiran yang disampaikan oleh para hakim, Ringkasan Isu ini bertujuan untuk memperluas diskusi tentang isu-isu gender dan memacu tindakan institusional dan individu.

Ringkasan Isu JIN ASEAN dirancang untuk:

- mendukung perubahan kelembagaan dalam isu-isu gender
- membangun kapasitas para hakim untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu-isu terkait gender
- menyediakan strategi untuk mengatasi stereotipe gender di ruang sidang
- memperkuat suara perempuan dalam posisi kepemimpinan
- mendukung para hakim yang bekerja untuk mengintegrasikan gender ke dalam pelatihan, kode etik dan protokol pelaporan

Data statistik dan tren tentang gender dan integritas peradilan, di seluruh ASEAN, dan

khususnya di negara-negara anggota JIN ASEAN, memberikan konteks pada diskusi peradilan tentang isu-isu ini. Setiap Ringkasan Isu akan membahas satu aspek dari gender dan integritas peradilan dan mengidentifikasi dampak serta area yang perlu ditindaklanjuti.

Para hakim, dengan mengambil tindakan yang melawan ketidaksetaraan gender, dapat menumbuhkan budaya kesadaran gender yang kuat dan transparan di antara rekan-rekan mereka, dan memajukan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai tempat perlakuan yang adil. Mengejar kualitas peradilan melalui kombinasi pembelajaran individu dan rekan sejawat, serta cerminan lembaga, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan para pemimpin peradilan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang datang ke pengadilan.

# Gender di Wilayah ASEAN

Mengetahui kondisi terkini dari isu-isu gender di ASEAN merupakan dasar untuk mengenali ketidaksetaraan ini ketika mereka muncul di ruang sidang. Secara global, perempuan dan anak perempuan menghadapi hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, hambatan dalam pekerjaan, pendidikan dan perlindungan hak-hak serta stereotipe yang mengancam pilihan dan keselamatan mereka. Dampak stereotipe gender terhadap transgender dan non-biner jarang diukur dan dilaporkan, meskipun contoh-contoh diskriminasi dan kejahatan berdasarkan kebencian menunjukkan kenyataan yang diskriminatif dan berbahaya.

Di kawasan ASEAN, penelusuran terhadap hak-hak dan ketidakadilan gender mengungkapkan risiko dan hambatan yang dihadapi perempuan. Pada tahun 2018, 9% perempuan dan anak perempuan berusia antara 15 - 49 tahun melaporkan kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya saat ini atau mantan

pasangannya dalam 12 bulan terakhir.<sup>4</sup> Lima belas persen anak perempuan di Asia Tenggara menikah sebelum usia 18 tahun, dan 2% di antaranya menikah sebelum berusia 15 tahun.<sup>5</sup>

Partisipasi pendidikan, pemungutan suara, dan tempat kerja perempuan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi di seluruh wilayah, perempuan menghadapi lebih banyak hambatan daripada laki-laki.

Melihat ketidaksetaraan gender di kawasan Asia Timur dan Pasifik, World Economic Forum berkomentar bahwa jika laju perbaikan tetap sama seperti yang terjadi antara tahun 2016 - 2019, maka dibutuhkan 163 tahun lagi untuk menutup kesenjangan gender.<sup>6</sup> Kawasan ini memiliki tingkat perubahan yang paling lama pada tingkat aktivitas saat ini.

OECD mengkaji isu-isu gender secara global, membuat laporan per negara dan mengidentifikasi tren dalam isu-isu sosial dan kesetaraan gender.<sup>7</sup>

Tabel 1: Lembaga Sosial dan Gender

Lokasi	Diskriminasi di dalam keluarga	Integritas fisik yang terbatas	Akses terbatas terhadap sumber daya dan aset	Kebebasan sipil yang terbatas
Indonesia	63.1	21.9	36.5	40.4
RDR Laos	31.3	23.9	20.2	29.0
Malaysia	80.8	..	..	..
Filipina	67.2	25.7	67.2	45.1
Thailand	33.4	22.7	25.2	56.8
Vietnam	23.3	30.8	32.3	13.8

Angka-angka di atas menunjukkan insiden diskriminasi gender, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan insiden yang lebih besar. Sumber: OECD (2021), "[Social Institutions and Gender](#)" (indikator)

<sup>4</sup> UN WOMEN (2019), [REGIONAL FACTSHEET Eastern and South-Eastern Asia and Oceania](#).

<sup>5</sup> UN WOMEN (2019), [REGIONAL FACTSHEET Eastern and South-Eastern Asia and Oceania](#).

<sup>6</sup><https://www.weforum.org/agenda/2019/12/gender-gap-report-gender-parity-how-to-speed-up->

[progress/](#) Sebagaimana dikutip dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/long-wait-indonesia-female-chief-justice-top-court>

<sup>7</sup> OECD (2021), "[Social Institutions and Gender](#)" (indikator)



---

## Indonesia

---



**56%** perempuan berada dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 70,2% dari total populasi berusia 15-64 tahun

Data tahun 2019. Sumber: International Labour Organization (via [World Bank](#)), 2021



**1 dari 9** hakim di Mahkamah Konstitusi adalah perempuan (2021)

**25%** hakim di pengadilan agama adalah perempuan (655 dari 2.555);



**26,1%** perempuan berusia antara 15-64 tahun mengalami kekerasan oleh pasangan mereka

Data tahun 2021. Sumber: [Pemerintah Indonesia](#), 2021



**18%** ketua pengadilan agama tingkat pertama adalah perempuan (73 dari 412);

**25%** hakim di pengadilan agama adalah perempuan (655 dari 2655)

Data tahun 2021. Sumber: [Australia Indonesia Partnership for Justice 2](#), 2021

---

## Republik Demokratik Rakyat Laos

---



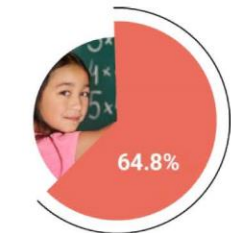
**80,5%** perempuan berada dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 81,4% dari total populasi berusia 15-64 tahun

Data tahun 2019. Sumber: International Labour Organization (via [World Bank](#)), 2021



Tingkat melek huruf untuk perempuan adalah **79%**, dibandingkan dengan 85% untuk total populasi orang dewasa

Data tahun 2015. Sumber: UNESCO (melalui [World Bank](#)), 2021



**64,8%** anak perempuan menyelesaikan sekolah menengah pertama, dibandingkan dengan 63,7% anak laki-laki.

Data tahun 2020. Sumber: [UNESCO UIS](#), 2021



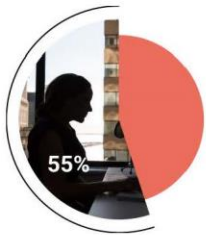
Perempuan menduduki **22%** kursi di parlemen

Data tahun 2021. Sumber: Inter-Parliamentary Union (via [World Bank](#)), 2021

---

## Malaysia

---



**55%** perempuan berada dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 68,6% dari total populasi berusia 15-64 tahun

Data tahun 2019. Sumber: International Labour Organization (via [World Bank](#)), 2021



Perempuan menduduki **15%** kursi di parlemen

Data tahun 2021. Sumber: Inter-Parliamentary Union (via [World Bank](#)), 2021



Indeks pemberdayaan gender untuk perempuan yang menyelesaikan SMP adalah **0,96** (di bawah 1,00 berarti perempuan memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah daripada laki-laki)

Data tahun 2020. Sumber: [UNESCO](#), 2021



**22,4%** posisi senat, **10,8%** perwakilan DPR, **8,6%** Menteri Kabinet dan **17,6%** Wakil Menteri adalah perempuan

Data tahun 2021. Sumber: [Departemen Statistik, Malaysia](#), 2021



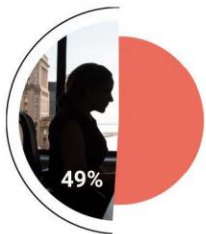
**12%** orang pernah mengalami 'sextortion' (pemerasan seksual) atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya

Data tahun 2020. Sumber: [Transparency International](#), 2020

---

## Filipina

---



**49%** perempuan berada dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 62,3% dari total populasi berusia 15-64 tahun

Data tahun 2019. Sumber: International Labour Organization (via [World Bank](#)), 2021



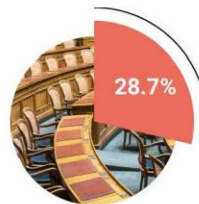
**20,1%** perempuan melaporkan mengalami kekerasan oleh pasangan

Data tahun 2008. Sumber: [UN Women](#), 2021



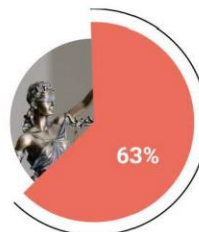
**9%** orang pernah mengalami 'sextortion' (pemerasan seksual) atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya

Data tahun 2020. Sumber: [Transparency International](#), 2020



Perempuan menduduki **28,7%** kursi di parlemen

Data tahun 2021. Sumber: [Otoritas Statistik Filipina](#), 2021



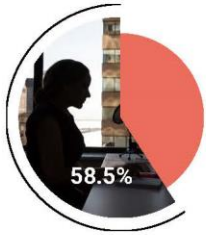
**63%** hakim adalah perempuan

Data tahun 2018. Sumber: [Mahkamah Agung Filipina](#), 2021

---

## Thailand

---



Hanya **58,5%** perempuan, dibandingkan dengan 74,6% laki-laki, berada dalam angkatan kerja

Data tahun 2020. Sumber: [ILOSTAT](#), 2020



Perempuan menduduki **15,75%** kursi di parlemen

Data tahun 2021. Sumber: Inter-Parliamentary Union (via [World Bank](#)), 2021



**15%** orang pernah mengalami 'sextortion' (pemerasan seksual) atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya

Data tahun 2020. Sumber: [Transparency International](#), 2020



Lebih dari **30.000** kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan ke Pusat Krisis Terpadu yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, namun hanya **5.000** kasus yang dicatat oleh polisi, dan hanya **1.500** kasus yang berujung pada penangkapan.

Sumber: Skinnider, E., Montgomery, r., & Garrett, S. The Trial of Rape. Bangkok, Thailand: UN Women, UNDP, UNODC. Dirujuk pada <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand/ending-violence-against-women>, 2017

---

## Vietnam

---



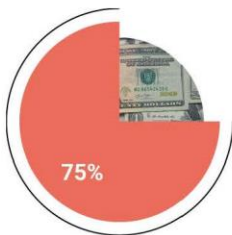
Hanya **62,6%** perempuan, dibandingkan dengan 74,8% laki-laki, berada dalam angkatan kerja

Data tahun 2022. Sumber: [Kantor Statistik Vietnam](#) (diterjemahkan), 2022



**3%** orang pernah mengalami 'sextortion' (pemerasan seksual) atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya

Data tahun 2020. Sumber: [Transparency International](#), 2020



Perempuan dibayar **75%** dari upah yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama

Data tahun 2021. Sumber: ILO Wages and Equitable Growth in Viet Nam, dirujuk pada <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam>, 2021



**35,2%** perempuan mengalami kekerasan fisik dan **10,8%** perempuan mengalami kekerasan seksual

Data tahun 2011. Sumber: [UN Women](#), 2021



Perempuan menduduki **30%** kursi di parlemen

Data tahun 2021. Sumber: Inter-Parliamentary Union (via [World Bank](#)), 2022



Di lembaga peradilan, **29%** dari hakim Mahkamah Agung Rakyat adalah perempuan dan **33%** dari hakim Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri adalah perempuan

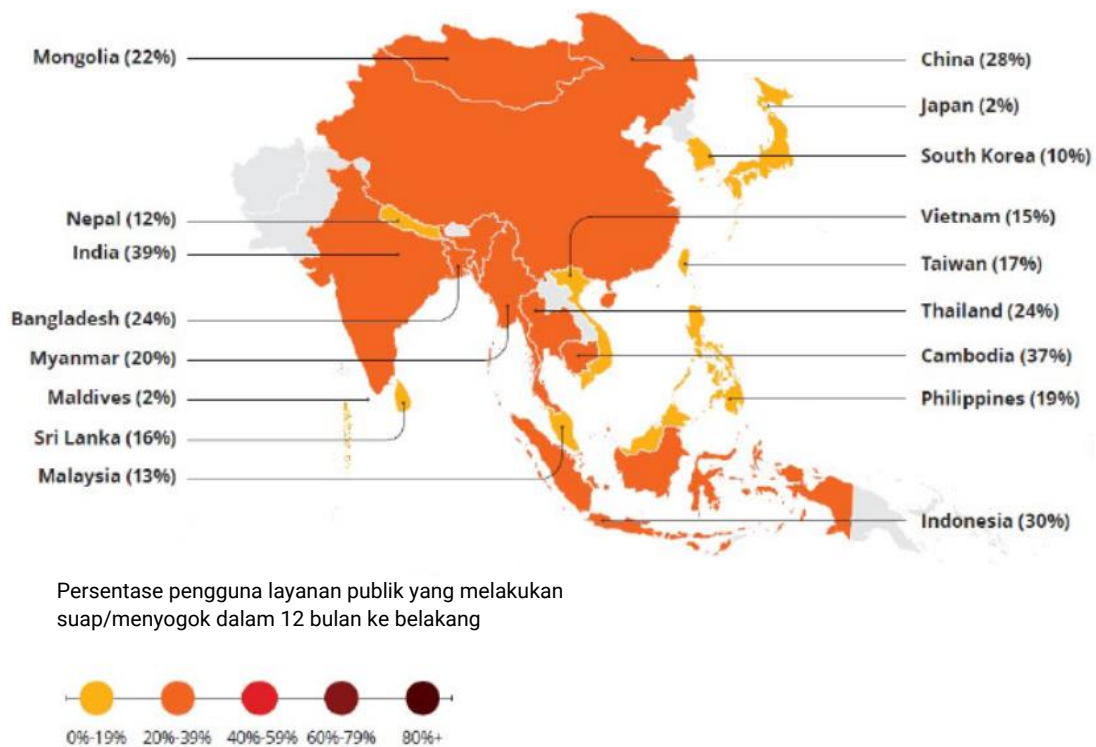
Data tahun 2013. Sumber: [UNODC](#), 2013

# Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Kualitas peradilan terkait erat dengan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa kepercayaan publik terhadap sistem, masyarakat tidak akan mempercayai hakim untuk mengadili sengketa-sengketa hukum. Korupsi dan bias, serta persepsi tentang adanya bias, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan.

Transparency International baru-baru ini menerbitkan Global Corruption Barometer: Asia 2020.<sup>8</sup> Survei ini mensurvei masyarakat tentang persepsi mereka terhadap berbagai lembaga dan kepercayaan mereka secara keseluruhan terhadap pelayanan publik.

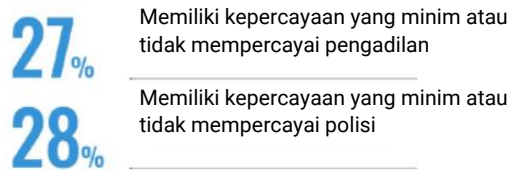
Gambar 1: Korupsi berdasarkan negara



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 21.

<sup>8</sup> Tersedia di [https://files.transparencycdn.org/images/GCB\\_Asia\\_2020\\_Report\\_Web\\_final.pdf](https://files.transparencycdn.org/images/GCB_Asia_2020_Report_Web_final.pdf)

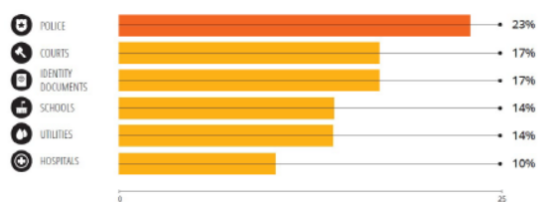
Gambar 2: Kepercayaan terhadap pengadilan dan polisi



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 17.

Gambar 3: Tarif suap berdasarkan layanan

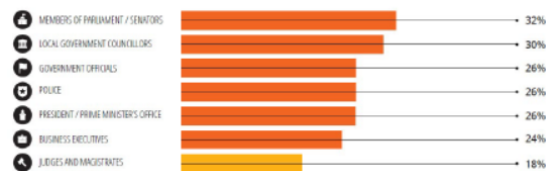
Persentase pengguna layanan publik yang melakukan suap/menyogok dalam 12 bulan ke belakang



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 22.

Gambar 4: Korupsi berdasarkan lembaga

Persentase orang yang berpikir bahwa sebagian besar/semua orang dalam kelompok/lembaga terlibat korupsi.



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 22.

Gambar 5: Pemanfaatan koneksi pribadi berdasarkan layanan

Persentase orang yang mengakses layanan publik dan menggunakan koneksi pribadi dalam 12 bulan terakhir.



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 24.

Korupsi mempengaruhi orang secara berbeda berdasarkan jenis kelamin. Global Corruption Barometer menemukan bahwa ada dimensi gender dalam penyuaipan dan korupsi. Perempuan lebih rentan membayar suap untuk mendapatkan layanan dan dokumen identitas seperti paspor atau SIM. Di sisi lain, laki-laki lebih cenderung membayar suap untuk layanan kesehatan dan utilitas. Jika hanya melihat suap kepada polisi, laki-laki 2,5 kali lebih mungkin membayar suap kepada polisi.<sup>9</sup>

Statistik ini menunjukkan bagaimana stereotipe gender mempengaruhi orang secara berbeda. Apakah perempuan diminta atau diharapkan untuk membayar suap untuk dokumen yang sering dipegang oleh laki-laki? Apakah laki-laki diharapkan untuk membayar suap untuk layanan di ranah yang secara stereotipe merupakan domain laki-laki seperti kepolisian? Jika ya, bagaimana perempuan diperlakukan ketika melaporkan kejahatan kepada polisi atau mencari layanan kesehatan atau identitas untuk keluarga mereka?

Temuan Global Corruption Barometer mungkin mencerminkan asumsi gender tentang kompetensi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan publik dan keluarga. Laporan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gender dan korupsi bersinggungan sehingga membuat perempuan enggan melaporkan kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Laporan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana korupsi membuat perempuan bergantung pada anggota keluarga laki-laki. Asumsi-asumsi ini menjadi hambatan tambahan bagi orang tua tunggal dan mereka yang kehidupannya tidak sesuai dengan stereotipe gender pada umumnya.

<sup>9</sup> Global Corruption Barometer: Asia 2020 oleh Transparency.org. halaman 21,

<https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>

# Gender dan Akses terhadap Keadilan

## DEFINISI

**Akses terhadap keadilan** adalah prinsip dasar dari negara hukum. Tanpa adanya akses terhadap keadilan, masyarakat tidak dapat menyuarakan pendapat mereka, menggunakan hak-hak mereka, melawan diskriminasi, atau meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan. Deklarasi Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Negara Hukum menekankan adanya hak akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang, termasuk anggota kelompok rentan, dan menegaskan kembali komitmen Negara-negara Anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, non-diskriminatif, dan bertanggung jawab yang mempromosikan akses terhadap keadilan bagi semua orang.

Sumber: [United Nations](#)

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

Akses perempuan terhadap keadilan dipengaruhi oleh diskriminasi gender seperti halnya akses perempuan terhadap layanan, keamanan, stabilitas ekonomi, dan pendidikan. Asumsi-asumsi gender mendorong pandangan yang sudah ketinggalan zaman dan membatasi kemampuan dan kebutuhan perempuan. Seksisme dalam pengambilan keputusan mempertahankan kontrol atas kehidupan perempuan dan mempertahankan kekuasaan serta hak istimewa dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang berperan dalam masyarakat ini juga mempengaruhi akses perempuan terhadap keadilan. Hambatan-hambatan ini cenderung memburuk bagi orang-orang transgender yang menghadapi tingkat diskriminasi dan intoleransi yang lebih tinggi. Orang-orang transgender mungkin tidak akan melaporkan kejahatan atau mengangkat kasus ke pengadilan karena

mereka cemas akan keselamatan dan privasi mereka.

Meskipun hak-hak hukum mungkin terlihat netral secara gender, namun realitas akses terhadap keadilan perlu melihat realitas kehidupan perempuan. Untuk dapat mengakses keadilan secara penuh, perempuan membutuhkan otonomi hukum dan ekonomi dari keluarga mereka, kontrol atas pekerjaan mereka, dukungan kesehatan dan pengasuhan anak, serta tingkat melek huruf dan pendidikan untuk memahami dan bertindak atas hak-hak mereka. Stereotipe gender dalam masyarakat kian melanggengkan pandangan tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan mungkin merasakan adanya tekanan untuk memaafkan atau membela suami yang melakukan tindakan penganiayaan. Gagasan yang sudah ketinggalan jaman tentang kekerasan dan pemerkosaan dalam pernikahan dapat menghalangi perempuan untuk

melaporkan kejahatan yang serius tersebut. Perempuan menghadapi stereotipe ini setiap kali mereka mengangkat kasus ke pengadilan, muncul sebagai saksi atau meminta perlindungan dari polisi atau pengadilan. Akses penuh terhadap keadilan hanya akan terwujud jika perempuan memiliki kesetaraan penuh dalam masyarakat. Hingga saat itu tiba, pengadilan dan peradilan adalah pilar utama yang melindungi hak-hak perempuan.

Memastikan akses terhadap keadilan, sebagai seorang hakim, sering kali berarti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kasus tersebut sampai ke pengadilan, mempertanyakan perjanjian yang dibuat antara pengacara, menawarkan rujukan ke dukungan hukum dan sosial, dan mengizinkan saksi untuk berbicara secara langsung untuk menjelaskan kebutuhan mereka dan tekanan yang mereka rasakan. Seorang hakim yang berasumsi bahwa segala sesuatu telah dilakukan secara adil sampai ke pintu ruang sidang berarti mengabaikan tugas mereka untuk memastikan akses yang sama ke pengadilan. Akses terhadap keadilan sering kali membutuhkan penyesuaian proses pengadilan, sumber daya, atau jadwal untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hakim, yang memegang kendali atas ruang sidang, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dan menuntut perubahan proses dan jadwal untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

## SEPERTI APA CONTOHNYA?

Perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap keuangan keluarga, pendidikan, atau pengasuhan anak mungkin tidak dapat mengangkat kasus ke pengadilan, menghadiri pengadilan, atau membayar pengacara.

Perempuan yang hidup dalam hubungan yang penuh kekerasan atau manipulasi mungkin takut untuk menghubungi polisi.

Perempuan yang memiliki anak mungkin takut kehilangan hak asuh atas anak-anak mereka jika mereka melawan pasangan pelaku kekerasan.

Perempuan yang telah diperlakukan tidak adil oleh aparat atau polisi mungkin tidak mempercayai sistem peradilan.

Perempuan yang mungkin menghadapi hambatan untuk mendaftarkan bisnis atau berurusan secara mandiri dengan bank.

Keamanan finansial atau hak-hak pekerjaan perempuan mungkin tidak dipertimbangkan sama seriusnya dengan laki-laki.

Dalam beberapa konteks, atau beberapa jenis kasus hukum, risiko yang dihadapi perempuan jauh lebih tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengajukan gugatan cerai atau melaporkan kekerasan seksual menjadi pencegah bagi perempuan lain yang hidup dalam situasi kekerasan. Perempuan yang kehilangan hak asuh atas anak-anak mereka karena mereka membela hak-hak mereka menjadi peringatan bagi perempuan lain. Perilaku hakim dapat secara tidak sengaja meniru atau memaafkan konsekuensi-konsekuensi ini.

Sebaliknya, hakim mampu mengakhiri siklus misogini dan kekerasan yang terjadi. Lembaga peradilan tidak hanya dapat menghindari pengiriman pesan-pesan diskriminatif dan berbahaya, tetapi juga secara eksplisit dapat menyatakan komitmen mereka terhadap kesetaraan dan perhatian mereka terhadap perilaku mengancam dari keluarga, pemberi kerja, ataupun pemimpin yang berusaha membungkam perempuan.

Langkah-langkah penting telah diambil di Indonesia untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pengadilan agama yang menangani sebagian besar masalah hukum keluarga. Selama satu dekade terakhir, bersama dengan organisasi non-pemerintah PEKKA, Pemerintah telah memperkenalkan layanan konsultasi hukum gratis dan pengadilan keliling serta membebaskan biaya pengadilan.

Antara tahun 2008 dan 2018, terjadi peningkatan 18 kali lipat dalam kasus-kasus pengadilan yang disidangkan oleh para hakim yang melakukan perjalanan ke pengadilan keliling. Dari sekitar 500.000 orang yang mengajukan perkara ke pengadilan keluarga pada tahun 2016, 57 persen di antaranya mendapatkan pembebasan biaya perkara, akses ke pengadilan keliling, atau mendapatkan nasihat hukum.

Sumber: : [UN WOMEN 2019 REGIONAL FACTSHEET Eastern and South-Eastern Asia and Oceania](#)

## TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Mengadakan pelatihan rutin untuk hakim baru tentang dampak diskriminasi gender terhadap akses terhadap keadilan.
- ✓ Membentuk komite tetap untuk kesetaraan gender untuk memantau dan melaporkan isu-isu gender dan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul.

## TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Terus mengikuti perkembangan terbaru tentang dampak gender terhadap akses terhadap keadilan.
- ✓ Berbagi laporan dengan kolega sebagai bagian dari pembelajaran sejawat.
- ✓ Turut membantu ketika perempuan ditolak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan di ruang sidang Anda.

## REFERENSI BERGUNA

- [Program Kesetaraan dan Keadilan Gender: Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan](#)



# Stereotipe dan Diskriminasi Gender di Ruang Sidang Anda

## DEFINISI

Stereotipe gender adalah pandangan umum atau prakonsepsi tentang atribut, karakteristik, atau peran yang dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh, ataupun dilakukan oleh, perempuan dan laki-laki. Stereotipe gender berbahaya jika membatasi kapasitas perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, mengejar karier profesional mereka dan/atau membuat pilihan dalam hidup mereka.

Baik yang terang-terangan (seperti "perempuan itu tidak rasional") maupun yang terdengar tidak berbahaya ("perempuan itu sifatnya mengayomi"), stereotipe berbahaya karena dapat melanggengkan ketidaksetaraan.

Sumber: [Gender Stereotyping, UNHCR](#)

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

Stereotipe gender adalah asumsi-asumsi yang dibuat secara sewenang-wenang tentang bagaimana perempuan dan laki-laki harus berperilaku atau bereaksi dan apa yang harus mereka lakukan dalam masyarakat. Stereotipe gender sering kali didasarkan pada pemahaman biner bahwa hanya ada dua cara untuk berperilaku, yaitu feminin atau maskulin, dan hanya dua cara tersebutlah yang benar. Stereotipe gender mencerminkan asumsi dan penilaian masyarakat, bukan berdasarkan bukti atau ilmu pengetahuan. Stereotipe gender melanggengkan penilaian yang merugikan tentang orang-orang dalam masyarakat dan hak-hak mereka.

Mengatasi diskriminasi gender di pengadilan melibatkan dua area utama:

1. menolak bukti dan argumen yang didasarkan pada stereotipe gender, dan

2. mengatur perilaku orang-orang di pengadilan untuk mencegah diskriminasi gender di ruang sidang.

## Stereotipe Gender dalam Menyikapi Bukti

Stereotipe gender dapat menciptakan kerugian nyata ketika tindakan dan kata-kata seseorang dinilai berdasarkan asumsi yang sewenang-wenang ini. Jika seorang saksi tidak dipercaya atau tidak dihormati karena jenis kelaminnya atau sebaliknya, tindakan seseorang diminimalkan atau dimaafkan karena jenis kelaminnya, maka dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Sebaliknya, pengadilan adalah tempat di mana setiap orang berhak atas kesetaraan, tidak hanya dalam akses mereka ke pengadilan, tetapi juga dalam bagaimana kesaksian mereka dan fakta-fakta kasus mereka akan didengar.

Hakim dan orang-orang yang bekerja di pengadilan memiliki kemungkinan besar untuk dipengaruhi oleh stereotipe gender

seperti halnya orang lain dalam masyarakat. Menyadari hal ini, para hakim harus waspada dalam memeriksa dasar penilaian mereka sendiri, mengidentifikasi dan menolak argumen yang didasarkan pada stereotipe, serta memastikan bahwa ruang sidang dan proses hukum bebas dari asumsi dan stereotipe.

Keputusan yang didasarkan pada stereotipe gender atau bukti yang disajikan dengan cara yang diskriminatif akan mengikis kepercayaan publik. Kelompok rentan, termasuk transgender, interseks dan non-biner, melihat bahwa pengadilan tidak akan melindungi hak-hak mereka atau bukan tempat yang aman untuk melaporkan kejahatan dan pelanggaran. Mereka meragukan integritas proses hukum karena mereka melihat bahwa stereotipe yang tidak berdasar ini diandalkan, diterima, dan direplikasi di pengadilan.

Stereotipe gender juga dapat mempersulit perempuan atau transpuan untuk melaporkan kekerasan atau mengambil langkah untuk melindungi hak-hak mereka. Pada saat kasus tersebut masuk ke pengadilan, korban mungkin sudah menghadapi tekanan dan stigma dari keluarga dan masyarakat.

Stereotipe gender yang umum dalam kasus-kasus hukum termasuk asumsi tentang peran perempuan dalam keluarga, kredibilitas atau keandalan mereka, dan yang paling merusak, mitos pemerkosaan yang menyalahkan perempuan atas perilaku kriminal para penyerangnya. Mitos pemerkosaan dalam proses pengadilan memperburuk bahaya kejahatan dengan mengalihkan kesalahan kepada korban dan bukannya berfokus pada perilaku kriminal pelaku.

Mitos seputar pemerkosaan dalam proses pengadilan muncul ketika hakim mengizinkan pertanyaan atau bukti tentang keputusan, pakaian, sejarah, atau

reaksi korban dalam kasus yang seharusnya difokuskan pada tindakan pelaku. Mengizinkan bukti atau pernyataan diskriminatif di ruang sidang mengkomunikasikan kepada perempuan bahwa pengadilan tidak akan melindungi hak-hak mereka atau meminta pertanggungjawaban pelaku. Karena ini, perempuan dapat kehilangan kepercayaan terhadap pengadilan dan peradilan.

Stereotipe gender juga merugikan orang-orang dengan identitas gender yang beragam dan membatasi kemungkinan bagi laki-laki dan anak laki-laki, serta perempuan dan anak perempuan. Orang-orang transgender dan non-biner menghadapi diskriminasi dan perlakuan yang buruk di masyarakat. Upaya hukum yang mereka tempuh untuk mendapatkan perlindungan hak-hak mereka bergantung pada apakah pengadilan akan melindungi martabat mereka dan menjunjung tinggi standar perlakuan yang setara. Asumsi dan penilaian yang didasarkan pada gagasan gender yang sudah ketinggalan zaman tidak dapat dipertahankan sebagai dasar keputusan hukum.

### **Diskriminasi Gender di Ruang Sidang**

Cara orang diperlakukan di dalam ruang sidang juga sangat penting bagi akses mereka terhadap keadilan dan kepercayaan mereka terhadap keputusan pengadilan. Jika pengacara, staf pengadilan, petugas polisi atau pengunjung umum diizinkan untuk berbicara atau memperlakukan orang dengan cara yang diskriminatif, tanpa pengawasan hakim, maka legitimasi keputusan keputusan hakim menjadi dipertanyakan. Pengelolaan ruang sidang adalah bagian penting dari bagaimana hakim menunjukkan kepada para pihak dan kepada publik bahwa pengambilan keputusan mereka tidak bias, berakar pada prinsip-prinsip dan aturan hukum.

Seksisme tidak hanya merusak kepercayaan terhadap keputusan, tetapi juga mempengaruhi kondisi kerja mereka yang berada di ruang sidang. Perempuan dan orang-orang dengan jenis kelamin yang berbeda yang bekerja sebagai pengacara, hakim, panitera, atau staf pengadilan atau yang muncul sebagai saksi atau pihak yang berperkara juga mengalami lingkungan kerja yang tidak bersahabat dan diskriminatif ini. *The Bangalore Principles* menjelaskan daftar alasan yang tidak relevan, yang menyatakan bahwa kata-kata atau tindakan yang memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kasta, kecacatan, usia, status perkawinan, orientasi seksual, dan area keberagaman lainnya yang melanggar kewajiban hakim untuk mengusung dan melindungi kesetaraan. Pedoman ini kemudian menetapkan lima area di mana hakim diharapkan untuk mencegah atau merespons diskriminasi saat mengelola ruang sidang:

1. Menyadari dan memahami keragaman dalam masyarakat termasuk ras, jenis kelamin, agama, kasta, disabilitas, usia, status perkawinan, orientasi seksual, dan area keberagaman lainnya
2. Tidak menunjukkan prasangka terhadap individu atau kelompok mana pun berdasarkan alasan yang tidak relevan; Tidak memperlakukan pihak, pengacara, staf, atau kolega mana pun secara berbeda berdasarkan alasan yang tidak relevan
3. Tidak mengizinkan staf pengadilan untuk

memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan alasan yang tidak relevan

4. Tidak mengizinkan pengacara untuk memperlakukan orang lain, atau membuat argumen atau komentar yang didasarkan pada prasangka atas dasar yang tidak relevan.<sup>10</sup>

Para hakim telah didisiplinkan dan dikedam secara terbuka atas perilaku atau komentar mereka di banyak negara, yang mengaitkan bahaya komentar dan perilaku seksis dengan integritas proses hukum. Seorang hakim di Amerika Serikat didisiplinkan karena email dan komentar yang dibuat secara pribadi, yang mengungkapkan pandangannya yang seksis dan misoginis. Ia dicopot dari jabatannya dalam sebuah keputusan yang berbunyi:

"Banyaknya komentar Anda membuktikan bahwa ini lebih dari sekadar masalah selera, kesopanan, atau pendapat pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak layak untuk duduk di bangku hakim. Entah itu ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau subjek tertentu, komentar Anda membuat Anda tidak mungkin dianggap sebagai juri yang adil dan tidak memihak. Pada dasarnya, anda telah mendiskualifikasi diri sendiri dari bangku hakim."<sup>11</sup>

## TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Mengundang masyarakat sipil, kelompok advokasi gender dan

<sup>10</sup>[https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge\\_products/Gender\\_Paper\\_FINAL\\_DOHA.pdf](https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_products/Gender_Paper_FINAL_DOHA.pdf) Hal. 38-39

<sup>11</sup> Surat Penangguhan dan Pemberhentian dari Jabatan (Komisi Disiplin dan Disabilitas

Yudisial Arkansas, 6 Agustus 2015),<sup>19</sup> [https://www.unodc.org/res/ji/import/disciplinary\\_proceedings/gender/maggio.pdf](https://www.unodc.org/res/ji/import/disciplinary_proceedings/gender/maggio.pdf).

perempuan serta pembela hak asasi manusia untuk melakukan pemantauan pengadilan mengenai dampak diskriminasi gender dalam praktik-praktik di ruang sidang dan bekerja untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi.

- ✓ Menggunakan panduan untuk bahasa dan perilaku ruang sidang yang netral terhadap gender.
- ✓ Mengeluarkan petunjuk praktik atau instruksi kepada pengacara tentang perilaku di ruang sidang yang peka terhadap gender.
- ✓ Memberikan pelatihan kepada panitera dan staf pengadilan tentang stereotipe gender, menetapkan ekspektasi yang jelas tentang netralitas dan kesetaraan gender.
- ✓ Membangun dukungan ramah anak di ruang sidang termasuk ruang pribadi bagi pengacara untuk bertemu dengan saksi anak dan koneksi video untuk bersaksi dalam kasus-kasus keluarga dan pidana.
- ✓ Membangun ruang saksi, layar dan opsi koneksi video yang terpisah untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender.
- ✓ Memastikan bahwa dukungan psikososial tersedia bagi saksi dan korban dan bahwa semua hakim memahami cara merujuk orang ke layanan ini.

## SEPERTI APA CONTOHNYA?

Seorang perempuan yang bersaksi di pengadilan tentang kasus bisnis ditanya: apakah dia benar-benar paham jika dibandingkan dengan saksi-saksi lainnya.

Seorang pengacara perempuan diinterupsi dan ditertawakan ketika dia menegaskan hak-hak kliennya.

Seorang pengacara menyarankan agar hakim tidak mempercayai kesaksian seorang perempuan karena ia tidak terdengar 'mengayomi' dan oleh karena itu pasti telah disuruh pihak tertentu.

Ingatan seorang perempuan tentang kejadian dipertanyakan, dan dia ditanya apakah ada laki-laki yang dapat mendukung kesaksiannya.

Pengacara atau hakim meminta ayah dari korban kekerasan seksual untuk mengambil keputusan untuknya, tanpa mendengar sang korban.

Seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual ditanyai tentang sejarah hubungannya di masa lalu atau pakaiannya.

Perempuan yang dipecat dari pekerjaannya diberikan pesangon lebih sedikit karena toh ia sudah menikah.

Kemampuan seorang perempuan untuk menangani kasus besar dipertanyakan karena ia memiliki anak.

Dalam memimpin ruang sidang, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang—pihak-pihak yang bersidang, saksi, pengacara, profesional lain di ruang sidang, dan rekan-rekan di bangku cadangan—diperlakukan dengan hormat, tidak hanya oleh hakim, tetapi juga oleh orang lain di ruang sidang, dan tidak menjadi sasaran tuntutan, komentar, atau perilaku yang tidak pantas.

Sumber: UNODC, [Gender-Related Issues in the Judiciary, Global Judicial Integrity Network](#), Hal. 13

## TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Perhatikan bahasa dan dinamika antara pengacara dan saksi untuk memastikan bahwa stereotipe gender tidak digunakan untuk melemahkan saksi.
- ✓ Terus mengikuti perkembangan penelitian mengenai mitos pemerkosaan dan stereotipe gender dalam hukum pidana dan hukum keluarga.
- ✓ Mengeluarkan petunjuk praktik atau instruksi kepada pengacara tentang perilaku di ruang sidang yang peka gender.
- ✓ Nyatakan dengan jelas di awal setiap kasus bahwa Anda mengharapkan semua orang di ruang sidang untuk mematuhi standar anti-diskriminasi dan kesetaraan yang tinggi.
- ✓ Panggil pengacara, staf pengadilan, dan pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang meremehkan, tidak sopan, atau diskriminatif, meremehkan, tidak sopan, atau bahasa yang diskriminatif di ruang sidang.
- ✓ Gunakan wewenang manajemen kasus Anda untuk memastikan persidangan yang cepat, dengan korban diberitahu selama proses berlangsung.
- ✓ Ambil langkah-langkah untuk mencegah korban yang harus berulang kali bersaksi atau

menceritakan kembali kisah mereka, yang membuat mereka mengalami trauma ulang.

- ✓ Buatlah pengaturan bagi saksi yang rentan untuk bersaksi dalam suasana privat atau tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku dengan menggunakan layar atau koneksi video langsung.
- ✓ Mewajibkan pengacara untuk mendemonstrasikan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk melindungi saksi dan korban yang rentan dari trauma sebelum memanggil saksi tersebut (dukungan psikososial, ruang saksi pribadi, layar, penggunaan rekaman video jika memungkinkan).

## REFERENSI BERGUNA

- [Panduan Umum Bangkok untuk Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara](#)
- [Pengambilan Keputusan Peradilan dengan Perspektif Gender](#)
- [Skandal di lembaga peradilan: Sebuah analisis tentang respon yang tidak merata dari Mahkamah Agung India terhadap tuduhan pelecehan seksual terhadap para hakim](#)

# Gender Sebagai Konsep yang Inklusif

## DEFINISI

Gender mengacu pada karakteristik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini mencakup norma, perilaku, dan peran yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dan dapat berubah seiring waktu.

Gender bersifat hierarkis dan menghasilkan ketidaksetaraan yang bersinggungan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi lainnya. Diskriminasi berbasis gender bersinggungan dengan faktor-faktor diskriminasi lainnya, seperti etnis, status sosial ekonomi, disabilitas, usia, lokasi geografis, identitas gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Hal ini disebut sebagai interseksionalitas.

Sumber: [World Health Organization](#)

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

Ilmu pengetahuan tentang pemahaman gender dan jenis kelamin terus berkembang, menghasilkan perubahan bahasa, kategori baru dalam identifikasi gender, dan tantangan baru bagi institusi hukum. Stereotipe gender sering kali didasarkan pada asumsi tentang dua jenis kelamin yang sesuai dengan jenis kelamin biologis seseorang. Namun, stereotipe gender ini tidak sesuai dengan kenyataan kebanyakan orang, dan bagi sebagian orang justru menimbulkan kerugian yang nyata. Orang-orang transgender, interseks, dan non-biner kerap dikucilkan atau didiskriminasi ketika mereka tidak mendapatkan layanan atau perlindungan karena gagasan-gagasan yang sudah ketinggalan zaman tentang gender. Pengadilan sering diminta untuk membuat keputusan tentang hak dan hak atas layanan bagi orang-orang yang identitas

dan kebutuhannya tidak sesuai dengan kategori gender secara historis.

Sebagai hakim yang mengadili kasus atau memutuskan masalah ini, ada beberapa langkah sederhana untuk memastikan bahwa ruang sidang aman dan menghormati semua pihak yang berperkara dan bahwa Anda menunjukkan pendekatan yang tidak bias dan berpikiran terbuka saat mendengarkan bukti.

Menggunakan, dan bersikeras agar semua orang di ruang sidang Anda menggunakan nama, kata ganti/panggilan, dan gelar yang disukai oleh saksi atau pihak yang berperkara akan memberikan rasa hormat dan mengingatkan orang-orang yang berdebat tentang konsep abstrak tentang hak-hak bahwa perdebatan ini memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan masyarakat. Sekarang, banyak pengadilan yang mengizinkan orang untuk memperkenalkan diri dan kemudian meminta setiap orang untuk menggunakan

nama, gelar, atau panggilan, terlepas dari nama atau jenis kelamin mereka yang terdaftar secara hukum. Hal ini dapat menjadi tanda penghormatan yang signifikan bagi seseorang yang menggugat nama resmi, status perkawinan, sebutan biologis atau interseks mereka atau mempertahankan transisi identitas gender mereka.

Kasus-kasus yang melibatkan homofobia atau orientasi seksual sering kali bersinggungan dengan gender. Homofobia sering kali didasarkan pada stereotipe gender tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak. Menyadari bagaimana diskriminasi gender bercampur dengan jenis-jenis diskriminasi lainnya akan memudahkan hakim untuk mengidentifikasi dan menolak asumsi-asumsi berbasis gender.

### TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Gunakan terminologi yang inklusif terhadap gender pada formulir pengadilan dan data pengadilan.
- ✓ Mengadopsi panduan untuk bahasa dan perilaku di ruang sidang yang peka gender.
- ✓ Menerbitkan petunjuk praktik atau instruksi kepada pengacara tentang perilaku di ruang sidang yang peka gender.
- ✓ Memberikan pelatihan kepada panitera dan staf pengadilan tentang stereotipe gender, menetapkan ekspektasi yang jelas tentang netralitas dan kesetaraan gender.

### SEPERTI APA CONTOHNYA?

Seorang saksi yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perempuan memperkenalkan diri, namun pengacara bersikeras menggunakan nama yang tertera di akta kelahirannya, dan memanggilnya dengan "Bapak" setiap kali sambil tertawa kecil. Saksi tersebut terlihat malu dan marah.

Sebelum sidang dimulai, seorang petugas polisi berkomentar dengan nada keras dan sinis tentang seorang pengacara yang merupakan seorang lesbian, dan menyarankan agar ia tidak diizinkan masuk ke ruang sidang. Klien pengacara tersebut dan semua saksi mendengar komentar tersebut

### TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Undang pengacara dan saksi untuk memperkenalkan diri. Gunakanlah nama, gelar, dan kata panggilan yang mereka gunakan.
- ✓ Ikuti perkembangan penelitian dan bukti terbaru tentang efek berbahaya dari penerapan stereotipe gender.
- ✓ Berikan contoh penghormatan kepada orang-orang dengan jenis kelamin yang beragam, termasuk transgender, interseks dan non-biner di ruang sidang Anda.
- ✓ Kecam pengacara, staf pengadilan, dan pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang meremehkan, tidak sopan, atau diskriminatif di ruang sidang.

### REFERENSI BERGUNA

- [Pengambilan Keputusan Peradilan dengan Perspektif Gender](#)

# Mencegah Diskriminasi Gender dalam Putusan Hukum

## DEFINISI

"Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penggunaan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya" [Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1979. 'Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW', Pasal 1].

Diskriminasi dapat berasal dari hukum (*de jure*) atau dari praktik (*de facto*). Konvensi CEDAW mengakui dan menangani kedua bentuk diskriminasi tersebut, baik yang terkandung dalam hukum, kebijakan, prosedur atau praktik.

Sumber: [UNICEF](#)

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

### Menghindari Opini Pribadi

Kepercayaan publik terhadap keputusan pengadilan berakar pada transparansi dan proses yang adil yang dikomunikasikan dalam keputusannya. Semua putusan, baik tertulis maupun lisan, merupakan kesempatan untuk memperkuat kesetaraan. Putusan tidak boleh memasukkan pendapat pribadi hakim atau merujuk pada keyakinan pribadi. Merujuk pada pendapat pribadi yang tidak relevan akan membuat orang meragukan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada

penilaian yang adil dan netral terhadap bukti-bukti yang ada.

Ketika bias, stereotipe, dan prasangka yang disadari atau tidak disadari dibiarkan membentuk cara hakim menafsirkan hukum, sistem peradilan menjadi mekanisme untuk melestarikan ketidaksetaraan alih-alih melindungi persamaan hak dan martabat manusia.<sup>12</sup>

### Menggunakan Bahasa yang Netral

Bahasa yang digunakan dalam putusan pengadilan sangat penting bagi para pihak dan kepercayaan publik. Putusan tertulis adalah dasar untuk pelaporan media dan seringkali merupakan satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengetahui kasus

<sup>12</sup> UNODC, [Gender-Related Issues in the Judiciary, Global Judicial Integrity Network](#), Hal. 13



atau prinsip hukum. Perhatian yang cermat terhadap apa yang dikomunikasikan oleh bahasa yang digunakan kepada publik merupakan bagian dari cara hakim menjaga integritas proses peradilan.

Menggunakan bahasa yang netral gender adalah bagian dari menyampaikan rasa hormat kepada semua orang dalam proses pengadilan. Hal ini juga menyiarkan kepada orang-orang yang membaca keputusan bahwa ruang sidang adalah tempat yang menghormati dan memperhatikan kesetaraan.

Putusan tidak boleh mengulangi, atau memuat, bahasa seksis atau diskriminatif yang digunakan oleh pengacara atau saksi. Sebaliknya, hakim dapat mencontohkan perilaku hormat yang diharapkan di pengadilan mereka dengan menggunakan gelar, nama, dan kata ganti yang digunakan oleh para saksi dan pihak-pihak untuk diri mereka sendiri. Berhati-hati untuk menghindari atau menyebut mitos pemerkosaan dalam bahasa yang digunakan dalam putusan kekerasan seksual akan mengirimkan pesan kepada polisi dan pengacara tentang perilaku yang diharapkan dalam kasus-kasus di masa depan. Menjadi akurat tentang status hukum dan hak-hak para pihak akan menyiarkan pesan yudisial kepada publik dan media tentang pentingnya hak-hak yang dipertaruhkan dalam setiap kasus.

Setiap upaya ini membantu membangun pemahaman publik tentang hak-hak hukum, menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan menggeser budaya seksisme dan diskriminasi dalam masyarakat.

Buku-buku pedoman dan panduan perancangan hukum dengan bahasa yang sederhana dapat menjadi alat yang berguna bagi para hakim untuk mengidentifikasi bahasa yang bermasalah dan mengganti bahasa yang umum digunakan, tetapi diskriminatif dengan

alternatif yang lebih akurat dan penuh rasa hormat.

### SEPERTI APA CONTOHNYA?

Ketika menulis putusan dalam kasus kekerasan seksual di mana korbannya adalah seorang anak berusia 14 tahun yang dilecehkan oleh seorang laki-laki berusia 48 tahun, hakim menyebut korban sebagai seorang anak. Hakim menolak menggunakan bahasa yang dipakai oleh pengacara pembela, yaitu menyebut korban sebagai seorang gadis, dan menyiratkan bahwa ialah yang menghasut terjadinya kontak seksual tersebut. Hakim mengetahui bahwa media akan melaporkan kasus ini, sehingga penting bagi masyarakat untuk mendengar secara akurat bahwa korban adalah seorang anak.

Keputusan tentang seorang perempuan yang terlibat dalam sengketa bisnis tidak perlu mengacu pada status perkawinannya atau apakah ia memiliki anak, untuk menghindari stereotipe gender yang tidak relevan dengan keputusan tersebut.

### TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Mengadakan sesi pelatihan rutin bagi para hakim tentang standar baru dalam teknik penulisan bahasa yang sederhana.
- ✓ Meninjau dampak gender dari pencantuman data pribadi, nama, nama anak, alamat, dan informasi keuangan dalam putusan pengadilan.
- ✓ Menerbitkan pedoman yang jelas tentang menghindari komentar dan opini pribadi dalam putusan pengadilan dan menolak atau mengoreksi penggambaran yang keliru oleh media tentang pihak-pihak yang berperkara dan para saksi.

- ✓ Mempersiapkan templat putusan pengadilan dan buku catatan yang menggunakan bahasa yang netral terhadap gender.

### TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Tetapkan ekspektasi yang jelas di awal setiap kasus bahwa Anda mengharapkan semua orang di ruang sidang untuk merujuk kepada para pihak dan saksi secara akurat terkait usia, jenis kelamin, dan motivasi. Hindari bahasa yang sensasional.
- ✓ Bersiaplah untuk menginterupsi pengacara yang menggunakan bahasa yang tidak akurat atau seksis untuk merujuk pada

perempuan dan anak perempuan, dengan menyadari dampak dari proses persidangan terhadap saksi atau korban.

- ✓ Gunakan bahasa yang menunjukkan rasa hormat kepada perempuan, anak perempuan dan orang-orang dengan gender yang beragam.

### REFERENSI BERGUNA

- [Panduan Umum Bangkok untuk Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara](#)
- [Pengambilan Keputusan Peradilan dengan Perspektif Gender](#)

# Representasi Gender di Lembaga Peradilan

## DEFINISI

Siapa yang mewakili kita di pengadilan merupakan hal penting. Masyarakat menyamakan peradilan yang beragam gender dengan pemerintahan yang lebih representatif. Keberagaman hakim dapat memastikan pendekatan yang seimbang dalam menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan publik dan keyakinan terhadap negara.

Sumber: [Evelyn Edroma](#), Policy Specialist, Rule of Law, Security and Human Rights Crisis Bureau, UNDP

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

### Menunjuk Anggota Peradilan yang Penuh Keberagaman

Peradilan yang mencerminkan susunan demografis masyarakat akan memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik dengan dua cara. Pertama, masyarakat melihat orang-orang dengan identitas dan pengalaman hidup yang sama berada dalam posisi otoritas, sehingga mereka lebih percaya bahwa sistem hukum akan memperlakukan mereka secara setara. Kedua, hakim dengan pengalaman hidup yang berbeda memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda pula tentang dampak hukum. Basis pengetahuan yang lebih luas di kalangan peradilan ini memperkuat basis kolektif untuk pengambilan keputusan.

Kepekaan gender dan rekam jejak dalam mempromosikan kesetaraan gender harus menjadi persyaratan bagi para calon hakim baru. Selain pengetahuan hukum seseorang, pengetahuan tentang diskriminasi historis dan sistemik juga menjadi persyaratan untuk memenuhi

kewajiban seorang hakim. Pengetahuan dan pengalaman menangani ketidaksetaraan harus menjadi kriteria untuk semua penunjukan hakim baru dan dalam perekrutan staf pengadilan.

### Kondisi Kerja Hakim Perempuan

Setelah diangkat, para hakim masih mengalami diskriminasi gender sepanjang karir mereka. Penugasan yudisial harus mencakup fleksibilitas untuk tanggung jawab keluarga, pengakuan atas pengalaman yang berbeda yang dibawa oleh perempuan, dan perhatian terhadap peluang dan promosi hakim perempuan dan laki-laki. Para pemimpin peradilan dapat terus memeriksa apakah peluang kepemimpinan, penugasan untuk kasus-kasus terkenal, dan kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka diberikan secara setara kepada hakim perempuan dan laki-laki.

Memastikan adanya representasi suara perempuan, termasuk perspektif tentang kasus dan interpretasi hukum, akan memberikan semua hakim, termasuk laki-laki, basis keahlian yang lebih luas untuk mendasari keputusan mereka. Hal ini

mendukung pengembangan profesional dan memanfaatkan potensi peradilan secara penuh.

Hakim perempuan mengalami seksisme di dalam lembaga peradilan, baik dari rekan-rekan mereka, dari staf pengadilan, atau dari pengacara di pengadilan. Mengatasi seksisme ini akan bermanfaat bagi hakim secara individu, baik perempuan maupun laki-laki, dan juga bagi pengadilan secara keseluruhan.

Hakim perempuan sering kali mendapati diri mereka dibatasi untuk mengadili kasus-kasus keluarga atau anak-anak. Menugaskan perempuan dalam kasus-kasus hukum keluarga didasarkan pada stereotipe bahwa perempuan lebih mengayomi. Penugasan yudisial yang didasarkan pada stereotipe seksis membatasi peluang hakim perempuan, dan juga hakim laki-laki. Pengalaman perempuan dalam pekerjaan atau bisnis sangat penting untuk hukum perdata yang relevan dan terus berkembang. Hakim perempuan di pengadilan pidana telah mengidentifikasi dan menyuarakan asumsi seksis dalam praktik kepolisian dan pengadilan, sehingga membuat sistem hukum menjadi lebih adil dan transparan. Ketika hakim perempuan hanya ditugaskan untuk menangani kasus-kasus yang sempit, keahlian mereka menjadi sia-sia.

### **Mempromosikan Perempuan di dalam Lembaga Peradilan**

Mempromosikan hakim dari semua jenis kelamin dan menciptakan peluang untuk kepemimpinan dan visibilitas perempuan sebagai hakim ketua merupakan langkah penting lainnya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum. Lembaga peradilan, seperti halnya lembaga-lembaga besar lainnya, harus secara teratur memeriksa peluang dan hambatan untuk promosi. Hakim-hakim perorangan yang membimbing para hakim yang baru diangkat, hakim-hakim

administratif yang menunjuk anggota komite, dan hakim-hakim senior yang melakukan penugasan di pengadilan, semuanya berperan. Pada setiap saat keputusan dibuat mengenai peluang karir hakim, dampak gender dari keputusan tersebut perlu dikaji.

### **SEPERTI APA CONTOHNYA?**

Seorang hakim perempuan dengan latar belakang hukum pajak internasional ditugaskan di pengadilan keluarga di daerah pedesaan.

Ketika sebuah komite baru dibentuk, hakim administratif bertanya kepada teman-temannya siapa yang ingin bergabung dengan komite tersebut, bukannya melihat keterampilan dan minat dari semua hakim di wilayah tersebut.

Seorang hakim mengundang hakim yang baru diangkat untuk menghadiri konferensi dan merekomendasikan mereka untuk dipromosikan dengan berkata, "dia mengingatkan saya pada diri saya sendiri 15 tahun yang lalu."

### **TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN**

- ✓ Menawarkan kesempatan pengembangan profesional dan pelatihan yang setara bagi hakim.
- ✓ Membentuk komite internal hakim untuk meninjau hambatan gender dalam perkembangan karir yudisial dan membuat rekomendasi untuk praktik-praktik perekrutan dan promosi.
- ✓ Meninjau proses pengangkatan hakim untuk mengidentifikasi dan menghapus diskriminasi gender.
- ✓ Melacak penunjukan komite, konferensi, pengembangan profesional, dan kesempatan lain yang berkaitan dengan karir berdasarkan gender.
- ✓ Mengambil tindakan untuk memperbaiki hambatan berbasis

gender bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Dewan Umum Kehakiman di Spanyol telah mengadopsi Rencana Kesetaraan untuk mengatasi masalah bias, diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan profesional di pengadilan. Rencana ini menetapkan, antara lain:

- Menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses karir yudisial
- Memastikan pelatihan yudisial yang memadai tentang kesetaraan, memerangi kekerasan berbasis gender dan penuntutan dengan perspektif gender
- Memberikan kesempatan promosi profesional bagi perempuan dan memastikan inklusi perempuan dalam posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar di dalam peradilan
- Mendorong partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kursus-kursus pelatihan, baik sebagai pembicara maupun peserta
- Mendorong pengarusutamaan gender di seluruh pelatihan yudisial
- Mendorong tanggung jawab dan keseimbangan antara keluarga, pekerjaan dan kehidupan pribadi dalam karir yudisial
- Pengembangan protokol tindakan terhadap semua bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual
- Melindungi kesehatan kerja para hakim sebelum dan sesudah melahirkan anak, serta hakim yang mengalami kekerasan atau pelecehan berbasis gender di tempat kerja
- Mengatasi kesenjangan upah berdasarkan gender di lembaga peradilan

Sumber: [UNODC](#)

## TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Tawarkan untuk menjadi mentor bagi hakim perempuan baru untuk membantu mereka menemukan peluang dan menunjukkan kepemimpinan mereka.
- ✓ Mengundang hakim-hakim perempuan baru untuk mengikuti pelatihan dan konferensi yang dapat meningkatkan profil dan keahlian mereka.
- ✓ Ketika diminta untuk berbicara tentang suatu masalah, sarankan hakim perempuan baru untuk ditambahkan ke dalam panel.

## REFERENSI BERGUNA

- [Gender, Keberagaman dan Keadilan: Tinjauan Umum dan Rekomendasi - OSCE Office for](#)

[Democratic Institutions and Human Rights](#)

- [Laporan Special Rapporteur tentang independensi hakim dan pengacara, United Nations General Assembly](#)
- [Peran Hakim Perempuan dan Perspektif Gender dalam Memastikan Independensi dan Integritas Peradilan, Global Judicial Integrity Network](#)
- Meneliti apakah peluang kepemimpinan, penugasan untuk kasus-kasus terkenal, kesempatan untuk memperluas pengetahuan yang ditawarkan secara merata turut membangun keterampilan perempuan

# Pemerasan Berbasis Seksual

## DEFINISI

Suatu bentuk eksploitasi seksual dan korupsi yang terjadi ketika orang-orang yang memiliki posisi otoritas ... berusaha untuk memeras bantuan seksual sebagai imbalan atas sesuatu yang berada dalam kekuasaan mereka untuk diberikan atau tidak diberikan. Pada dasarnya, *sextortion* adalah bentuk korupsi yang menggunakan seks, bukan uang, sebagai alat suap.

Sumber: [IAWJ](#)

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

Pemerasan berbasis seksual atau *sextortion* adalah bentuk korupsi di mana seseorang yang berkuasa menawarkan keuntungan dengan imbalan bantuan seksual. Bentuk ini memiliki dinamika kekuasaan dan penyalahgunaan posisi yang sama dengan korupsi keuangan, dengan tambahan aspek gender yang sebagian besar, meskipun tidak secara eksklusif, menargetkan perempuan. Asosiasi Hakim Perempuan Internasional (International Association of Women Judges/IAWJ) mendefinisikan istilah *sextortion* dan telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini di dalam lembaga peradilan dan dalam diskusi internasional tentang kualitas peradilan.<sup>13</sup> IAWJ mengidentifikasi tiga komponen utama *sextortion*:

- Seseorang yang dipercayai dengan wewenang, yang
- Menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan imbalan imbalan seksual dan

- Mengandalkan pemaksaan berbasis wewenangnya, bukan kekerasan fisik atau paksaan, untuk mendapatkan keuntungan seksual.

Keuntungan seksual dipahami sebagai segala jenis aktivitas seksual, sentuhan yang tidak pantas, memperlihatkan bagian tubuh, atau berpose untuk foto seksual.

Pemerasan seksual adalah bentuk korupsi yang memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Perempuan lebih sering menjadi sasaran dalam penyalahgunaan kekuasaan ini. Fakta bahwa *sextortion* tidak pernah disuarakan atau dipantau di masa lalu telah membuat risiko ini, yang khususnya mempengaruhi perempuan, kurang terlihat. Mengakui adanya penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi dan mendidik para hakim tentang prevalensinya adalah langkah pertama untuk memerangi pemerasan seksual. Hakim, jaksa dan polisi harus menggunakan undang-undang anti korupsi dalam kasus-kasus pemerasan seksual untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat

<sup>13</sup> [Fighting Sextortion Toolkit](#), IAWJ

bahwa bentuk korupsi ini serius dan tidak akan ditoleransi.

Mengingat sifat sensitif dan seringkali memalukan dari pelaporan pemerasan seksual, hakim dan petugas pengadilan juga harus secara khusus memahami kerentanan dan risiko yang dihadapi perempuan. Memastikan akses ke staf yang terlatih dan prosedur pengaduan yang menghormati hak-hak akan memudahkan orang untuk melaporkan pemerasan seksual. Seperti halnya dengan kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual, pengadilan harus menyadari mitos-mitos yang lazim dan memastikan bahwa asumsi atau stereotipe tidak mempengaruhi penilaian mereka sendiri terhadap korban *sextortion*, dan juga terhadap perilaku para penyelidik, polisi, dan petugas pengadilan.

Hakim, sebagai pejabat publik yang ditugaskan untuk melindungi hak-hak orang yang paling rentan, memiliki peran kepemimpinan dalam mengubah persepsi tentang pemerasan seksual.

Pada tahun 2020, Transparency International menambahkan pertanyaan tentang pemerasan seksual dalam survei tahunan tentang persepsi publik tentang korupsi. Ini adalah tahun pertama data tersedia tentang persentase orang yang pernah memiliki seseorang dalam posisi berkuasa yang secara eksplisit menawarkan manfaat sebagai imbalan atas bantuan seksual. Ditemukan bahwa pemerasan seksual adalah hal yang umum terjadi di wilayah ASEAN.

## **Pemerasan Seksual di dalam Pengadilan**

Pemerasan seksual, yang terlihat jelas di banyak sektor dan layanan, juga merupakan masalah dalam administrasi pengadilan. Para hakim tidak hanya harus waspada terhadap *sextortion* ketika dilaporkan dan diperdebatkan di pengadilan, tetapi mereka juga harus waspada terhadapnya dalam pengoperasian gedung pengadilan.

Kasus-kasus pemerasan seksual secara global melibatkan tekanan pada saksi, pihak yang berperkara, staf pengadilan dan pengacara untuk memberikan bantuan seksual sebagai imbalan atas proses pengadilan yang lebih cepat, kesempatan kerja, biaya yang lebih rendah, keputusan imigrasi dan hukuman yang lebih ringan.<sup>14</sup>

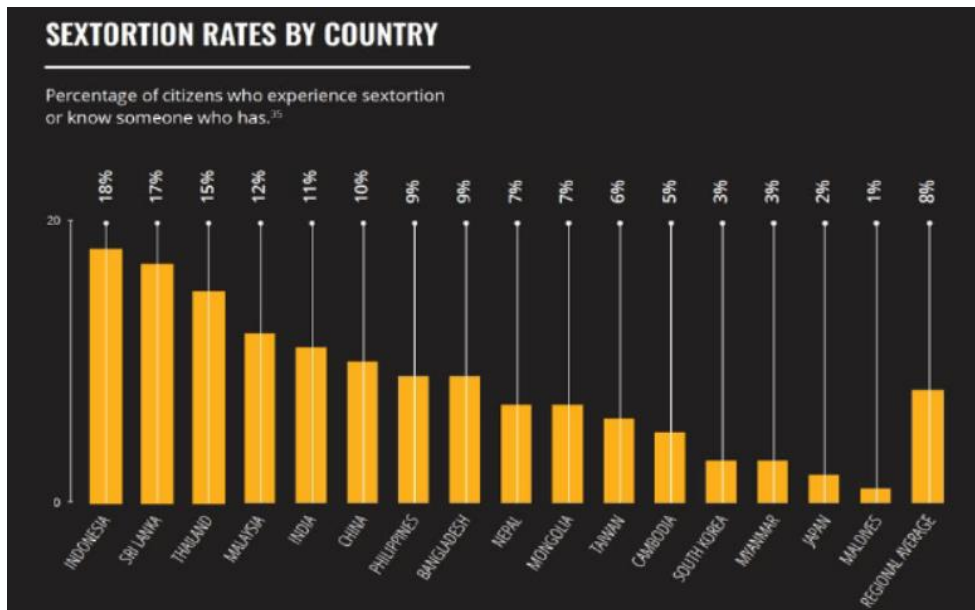
Hakim dapat memimpin dalam mengembangkan prosedur pelaporan, pengaduan dan investigasi untuk memastikan bahwa ada mekanisme yang aman dan dapat diandalkan dalam administrasi pengadilan untuk menangani *sextortion*.

Hakim seringkali merupakan satu-satunya yang berada dalam posisi untuk mengungkap kesalahan rekan-rekan mereka. Ketidakseimbangan kekuasaan antara hakim dan panitera, saksi atau pihak yang berperkara membuat perilaku koruptif sangat tidak mungkin untuk dilaporkan. Seorang rekan sejawat, dengan kekuasaan dan kredibilitas profesional yang setara memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan ini.

---

<sup>14</sup>[https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge\\_products/Gender\\_Paper\\_FINAL\\_DOHA.pdf](https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_products/Gender_Paper_FINAL_DOHA.pdf)

Gambar 6: Tingkat pemerasan berbasis seksual berdasarkan negara



Sumber: Transparency International. Global Corruption Barometer: Asia 2020. Halaman 26.

### SEPERTI APA CONTOHNYA?

Seorang perempuan mencoba mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Petugas mengatakan bahwa ia tidak punya waktu, tetapi jika perempuan itu mau menemuinya untuk makan malam, sang petugas akan melakukannya.

Seorang ibu meminta seorang pengacara untuk mewakili putranya yang telah ditangkap polisi, meskipun mereka tidak memiliki banyak uang. Sambil menyentuhnya, pengacara tersebut berkata bahwa mereka dapat mengatur 'sistem pembayaran'.

Seorang panitera baru di pengadilan meminta untuk menghadiri sesi pelatihan. Hakim yang bekerja dengannya sering memastikan bahwa mereka hanya berduaan di kantor. Hakim tersebut mencoba menciumnya dan ketika sang panitera keberatan, sang hakim pun menolak permintaan pelatihannya.

- ✓ Memberikan pelatihan kepada para hakim tentang pola-pola yang terlihat dalam kasus-kasus pemerasan seksual, membekali para hakim untuk mengenali tanda-tanda pemerasan seksual dalam fakta-fakta kasus atau sikap para saksi. Memberikan ide-ide untuk bertanya dengan hormat tentang pemerasan seksual.
- ✓ Membuat mekanisme pengaduan yang memungkinkan pelaporan pemerasan seksual yang aman dan rahasia, dengan konsekuensi yang dapat ditegakkan.
- ✓ Mengadvokasi reformasi hukum untuk memasukkan pemerasan seksual sebagai referensi eksplisit dalam ketentuan anti-korupsi.
- ✓ Mempromosikan dan mendukung pendidikan publik tentang pemerasan seksual sebagai kejahatan yang akan ditangani secara serius oleh pengadilan.

### TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Menerbitkan pedoman yang jelas yang mendefinisikan dan mengancam pemerasan seksual.



## TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Menghukum dan menjatuhkan hukuman dalam kasus-kasus pemerasan seksual dengan menggunakan undang-undang dan hukuman yang sama dengan kasus-kasus penyuapan dan korupsi keuangan.
- ✓ Memperhatikan dinamika antara hakim, pengacara dan pejabat pengadilan senior dan perempuan yang bekerja di atau menghadiri pengadilan, waspada terhadap tanda-tanda pemerasan seksual.
- ✓ Mengecam rekan kerja yang memperlakukan staf junior dengan cara yang berbau seksual.

## REFERENSI BERGUNA

- [Toolkit Melawan Pelecehan Seksual, IAWJ](#)
- [Pemerasan Seksual: Kejahatan Korupsi dan Eksploitasi Seksual, International Bar Association](#)
- [Memecah Kesunyian Seputar Pelecehan Seksual: Hubungan Antara Kekuasaan, Seks dan Korupsi, Transparency International](#)

# Pelecehan Seksual dan Tindakan Pelanggaran Seksual

## DEFINISI

**Pelecehan seksual** adalah setiap ajakan seksual yang tidak dikehendaki, permintaan untuk mendapatkan bantuan seksual, tindakan atau isyarat verbal atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual yang secara wajar dapat diharapkan atau dianggap dapat menimbulkan rasa tersinggung atau penghinaan terhadap orang lain, ketika perilaku tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan sebagai syarat kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak bersahabat, atau menyinggung perasaan. Meskipun biasanya melibatkan suatu pola perilaku, pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk insiden tunggal. Pelecehan seksual dapat terjadi antara orang yang berlawanan atau sesama jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban atau pelaku.

Sumber: [UN WOMEN](#)

**Eksplorasi seksual** mengacu pada penyalahgunaan posisi kerentanan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan keuntungan secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.

**Kekerasan seksual** mengacu pada gangguan fisik yang nyata atau ancaman gangguan fisik yang bersifat seksual, baik secara paksa atau dalam kondisi yang tidak setara atau paksaan.

Sumber: UN Secretary General

## KOMENTAR: IMPLIKASI BAGI KUALITAS PERADILAN

### Pelecehan Seksual

Pengadilan harus tetap waspada terhadap pelecehan seksual di dalam lembaga peradilan atau staf pengadilan, seperti halnya dalam kasus-kasus yang diperdebatkan di ruang sidang. Protokol pelaporan yang jelas dan proses pengaduan yang terpercaya merupakan komponen kunci dalam membangun

budaya internal yang bebas dari seksisme dan diskriminasi.

Kasus-kasus dari lembaga peradilan di setiap wilayah di dunia dan di setiap tingkat pengadilan menunjukkan bahwa hakim dan pegawai pengadilan berisiko mengalami pelecehan seksual dari orang-orang yang menggunakan posisi otoritas mereka untuk mengintimidasi mereka agar

patuh atau membuat mereka takut untuk melapor.<sup>15</sup>

Terlepas dari apakah pelecehan seksual itu berupa insiden tunggal berupa sentuhan atau komentar yang tidak pantas atau tekanan yang tidak diinginkan dalam jangka waktu lama, insiden-insiden ini menseksualisasi tempat kerja dan menyebabkan perempuan takut akan keselamatan atau keamanan pekerjaan mereka. Hal ini juga mengkomunikasikan pesan bahwa perempuan tidak dihargai secara setara di tempat kerja.

Pelecehan seksual mencakup komentar langsung, proposisi atau ancaman terhadap seorang perempuan, serta komentar umum, lelucon, gambar yang dibagikan di lingkungan kerja. Komentar, gambar, dan lelucon membuat tempat kerja menjadi tidak bersahabat bagi semua perempuan yang bekerja di sana. Hal ini juga berdampak pada laki-laki yang bekerja di pengadilan, menciptakan lingkungan yang bernuansa seksual yang membuat mereka tidak nyaman, atau harus membantu melindungi rekan kerja dari rekan kerja yang melakukan pelecehan. Semua orang akan diuntungkan jika tempat kerja bebas dari perilaku seksual.

Pesan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan konsekuensi dari perilaku yang tidak pantas harus diberikan kepada semua staf, termasuk semua hakim. Hal ini harus disertai dengan proses pengaduan yang transparan yang mendorong orang untuk melaporkan pelecehan seksual dengan keyakinan bahwa masalah tersebut akan ditangani, serahasia mungkin. Investigasi harus dilakukan dengan segera, terlepas dari seberapa senior pelaku. Meskipun kerahasiaan dalam prosesnya penting, kerahasiaan dalam hasilnya tidak penting.

Penting bagi hakim dan staf pengadilan untuk melihat bahwa peradilan menangani masalah ini dengan serius dan bahwa ada konsekuensi serius bagi pelanggaran hak. Seperti dalam masyarakat pada umumnya, staf akan mengawasi pemerintahan untuk melihat apakah pemerintahan akan menindaklanjuti kebijakannya, meminta pertanggungjawaban setiap orang, bahkan orang yang berkuasa sekalipun.

## Perilaku di Luar Pengadilan

Pengawasan terhadap pelanggaran seksual dan perilaku diskriminatif hakim di luar ruang pengadilan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kemampuan hakim tertentu untuk memberikan keputusan yang bebas dari bias.

### SEPERTI APA CONTOHNYA?

Seorang pegawai senior hanya mempekerjakan perempuan muda dan menyarankan agar mereka memakai rok ke kantor.

Seorang hakim membuat lelucon dan komentar yang bersifat seksis tentang satu-satunya hakim perempuan di kantor.

Seorang pengacara berulang kali menyentuh perempuan di ruang sidang di bagian punggung atau lengan mereka, mengomentari penampilan mereka..

Perilaku hakim di luar ruang sidang juga patut diperhatikan, dan perilaku sosial, email, atau riwayat pribadi yang tidak pantas dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pribadi dan profesional hakim.

Sumber: UNODC, [Gender-Related Issues in the Judiciary, Global Judicial Integrity Network](#), Hal. 12

<sup>15</sup> Simbajon v. Esteban, 312 SCRA 192 (1999) (the Philippines). Tan v. Pacuribot, (A.M. No. RTJ-06-1882, Dec.

14, 2007) (the Philippines). Talens-Dabon v. Arceo, 259 SCRA 354 (1996) (the Philippines)

## TINDAKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN

- ✓ Menetapkan pedoman yang jelas tentang kecaman pengadilan terhadap pelecehan seksual dan pelanggaran. Mengadakan pelatihan wajib untuk semua staf, termasuk hakim, tentang perilaku yang sesuai di tempat kerja.
- ✓ Menetapkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan pelaporan pelecehan seksual yang aman dan rahasia dengan perlindungan yang dapat ditegakkan terhadap kemungkinan pembalasan dendam/retaliasi.
- ✓ Menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan seksual di pengadilan, terlepas dari status pelaku
- ✓ Meninjau pola insiden pelecehan seksual atau pelanggaran setiap tahun dan merevisi pelatihan dan komunikasi untuk terus mengubah budaya untuk menghapus pelecehan seksual.

## TINDAKAN OLEH HAKIM

- ✓ Menantang rekan sejawat yang menggunakan bahasa seksual terhadap staf junior, saksi, atau pihak yang berperkara.

- ✓ Mendukung staf atau hakim yang ingin menggunakan proses pengaduan untuk melaporkan pelecehan seksual atau pelanggaran
- ✓ Melakukan intervensi ketika rekan kerja meremehkan atau melakukan pembalasan atas pengaduan pelecehan seksual.
- ✓ Mengambil tindakan, sebagai pengamat, ketika Anda mengamati insiden pelecehan seksual atau perilaku tidak senonoh, dengan memprioritaskan keselamatan orang yang dilecehkan.

## REFERENSI BERGUNA

- [Pelecehan marak terjadi di ruang sidang dan pengadilan, menurut asosiasi pengacara - The Guardian](#)
- [Kami juga? Penindasan dan Pelecehan Seksual dalam Profesi Hukum - International Bar Association \(IBA\)](#)
- [Lembaga Peradilan Tidak Kebal dari Perundungan dan Pelecehan Seksual - Global Judiciary Integrity Network](#)

# Lampiran

Global Judicial Integrity Network membahas serangkaian rekomendasi dalam Deklarasi Doha yang dapat diambil oleh hakim, pengadilan, negara, dan badan-badan internasional untuk menanggapi isu-isu gender dalam peradilan. Jaringan ini membuat tiga kategori rekomendasi:

## **Panduan yang jelas dan komprehensif tentang isu-isu integritas terkait gender**

- Memasukkan ketentuan-ketentuan spesifik gender dalam kode etik
- Menggunakan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* untuk memberikan panduan yang lebih jelas tentang isu-isu integritas peradilan yang berkaitan dengan gender
- Mengadopsi kode etik peradilan yang konsisten dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*
- Mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang peka terhadap gender dan panduan lainnya
- Mengaitkan integritas peradilan dalam kerangka kerja kesetaraan gender dan antikorupsi internasional

## **Akuntabilitas Peradilan untuk Pelanggaran yang Berkaitan dengan Gender**

- Mengadopsi standar yang jelas tentang perilaku peradilan dan membuat informasi tersebut tersedia melalui berbagai saluran

- Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk melaporkan pelanggaran di dalam pengadilan
- Membentuk badan disipliner yang independen untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran yudisial
- Menetapkan prosedur disipliner yang jelas
- Mengizinkan mereka yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran untuk melakukan investigasi
- Melindungi kerahasiaan investigasi, tetapi memberikan transparansi sehubungan dengan disposisi kasus
- Memastikan bahwa proses pengaduan dilakukan dengan cepat, menyeluruh dan tidak memihak
- Menyediakan berbagai tindakan korektif yang cukup luas untuk menangani secara proporsional keseriusan perilaku dalam setiap kasus
- Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencegah, memantau, dan menangani pelanggaran yang berkaitan dengan gender
- Mengarusutamakan kepekaan gender ke dalam semua aspek sistem peradilan
- Mempertimbangkan isu-isu gender dalam pengangkatan hakim dan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja mereka
- Mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian yang berdasarkan informasi empiris untuk mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan gender dan

- mengembangkan strategi yang efektif untuk mengoreksi perilaku yang tidak pantas
- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara teratur tentang seberapa baik proses pengaduan bekerja
- Program pendidikan dan pelatihan harus dievaluasi secara teratur, dengan menggunakan berbagai metode evaluasi, untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya yang berkelanjutan
- Membagikan praktik-praktik yang baik di dalam jaringan peradilan.

### **Pendidikan dan Pelatihan Peradilan yang Efektif**

- Mengarusutamakan pertimbangan isu-isu gender ke dalam setiap tahap pendidikan hukum
- Pendidikan dan pelatihan tentang isu-isu integritas yang berkaitan dengan gender harus menasar semua pihak di dalam sistem peradilan, dan juga masyarakat luas
- Hakim senior dan hakim yang berperan sebagai pengawas tidak hanya harus memberikan contoh, tetapi juga berpartisipasi dalam pelatihan
- Peradilan harus memperlakukan pelatihan tentang isu-isu integritas terkait gender sebagai hal yang wajib sedapat mungkin
- Pelatihan gender harus menarik dan bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan
- Pelatihan harus komprehensif dan membahas berbagai masalah integritas terkait gender
- Pelatihan kepatuhan (*compliance*) harus menjadi komponen utama dari setiap pelatihan tentang masalah integritas terkait gender
- Pelatihan harus membahas sikap, perilaku, dan budaya kelembagaan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terkait gender
- Pelatihan intervensi pengamat harus disertakan dalam upaya untuk mengatasi masalah integritas terkait gender



**United Nations Development Programme**  
Bangkok Regional Hub  
3rd Floor United Nations Service Building  
Rajdamnern Nok Avenue, Phranakorn  
Bangkok 10200 Thailand

